

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak merebaknya isu lingkungan dan sosial dewasa ini, perusahaan-perusahaan semakin menyadari bahwa tujuan perusahaan tidak lagi terbatas pada memaksimalkan laba perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, mengingat bahwa dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan harus berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya masalah-masalah sosial. Tidak hanya dengan masyarakat, berbagai pihak pun dapat dipengaruhi oleh aktivitas operasional perusahaan, seperti karyawan perusahaan, pemegang saham, pemerintah/regulator, dan pihak-pihak lainnya atau lebih dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholder). Seperti diungkapkan pula oleh Mackey, Mackey, & Barney (2005), bahwa konsentrasi yang terfokus pada memaksimalkan kekayaan pemegang ekuitas dapat menyebabkan manajemen mengabaikan pemangku kepentingan yang cukup penting lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas sosial yang lebih luas.

Sebagai contoh, kasus lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Dalam kasus tersebut sangat banyak kerugian yang ditimbulkan. Mulai dari kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan, sampai kerugian yang harus ditanggung masyarakat yang harus kehilangan tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan karena telah terkubur oleh lumpur yang masih menyembur ke atas bumi Sidoarjo sampai saat

ini. Jadi, sudah seharusnya perusahaan menyadari bahwa mereka mengemban tanggung jawab atas masalah sosial yang diakibatkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Masalah-masalah sosial yang akan dihadapi perusahaan sangatlah luas. Beberapa diantaranya dan seringkali menjadi sorotan publik adalah lingkungan, sumber daya manusia/ketenagakerjaan, energi, *community involvement*, dan produk. Dan dari penjelasan di atas, maka sudah seharusnya perusahaan melakukan pengungkapan terhadap masalah sosial perusahaan sebagai wujud dari pertanggungjawaban perusahaan, mengingat pentingnya pengungkapan tersebut dan dampaknya bagi para pemangku kepentingan. Akibatnya, timbul suatu konsep yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Lalu, apakah yang didefinisikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan tersebut? Terlebih dahulu akan dibahas tentang pemangku kepentingan sebagai pihak yang dipengaruhi oleh berbagai tindakan tanggung jawab sosial perusahaan. Terminologi pemangku kepentingan atau lebih dikenal dengan istilah "stakeholder" pertama kali didefinisikan oleh Freeman (1984) sebagai berikut: "kelompok pemangku kepentingan utama secara khusus terdiri dari pemegang saham dan investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok yang secara bersama-sama atau individu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan" (Venanzi & Fidanza, 2006). Kemudian Clarkson (1995) memperluas konsep tentang pemangku kepentingan dengan menyertakan kelompok pemangku kepentingan publik yang didefinisikan sebagai: "pemerintah dan komunitas yang menyediakan infrastruktur dan pasar, yang hukum dan regulasinya harus dipatuhi dan kepada siapa pajak dan kewajiban lainnya dibayarkan" (Venanzi & Fidanza, 2006). Jadi, secara umum dapat

dikatakan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan perusahaan dan memiliki kepentingan serta dipengaruhi dalam setiap keputusan perusahaan.

Tanggung jawab sosial sendiri memiliki berbagai variasi definisi. Menurut Kotler & Lee (2005), tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui “discretionary business practices” dan “contribution of corporate resources” (Shea, 2006). Sementara, European Commission (2001) mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai ‘suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan secara sukarela’ (Fiori, Donato, & Izzo, 2007). Dengan kata lain, perusahaan melakukan aktivitas sosialnya secara sukarela dengan tujuan untuk menjalin hubungan dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Seperti diungkapkan pula oleh Gariga & Mele (2004) aktivitas sosial perusahaan lebih dari sekedar cara sederhana untuk mencapai hasil ekonomi, karena melalui aktivitas tersebut perusahaan dapat mengembangkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan (Freeman, 1984), dan secara tidak langsung menciptakan nilai untuk pemegang saham (Fiori, Donato, & Izzo, 2007).

Selain hubungan dan keuntungan yang diberikan kepada pemangku kepentingan, pentingnya aktivitas tanggung jawab sosial juga sepenuhnya didukung oleh pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) yang telah disahkan dan diundang-undangkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam undang-undang terbaru tentang PT tersebut terdapat aturan mengenai “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Aturan tersebut diatur

secara khusus dalam pasal 74 UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas. Ayat 1 pasal 74 ini menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”¹ Jika perseroan tersebut tidak mengindahkan undang-undang ini, dengan kata lain tidak menjalankan kewajibannya menyangkut tanggung jawab sosial, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diatur di ayat 3 pasal 74 UU No. 40/2007. Jadi, sudah merupakan keharusan bagi setiap perseroan yang jenis usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau berdampak pada sumber daya alam ataupun kedua-duanya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Serta, tidak ada lagi alasan bagi perseroan tersebut untuk mangkir dari kewajibannya karena ada sanksi yang diberlakukan.

Namun, yang menjadi masalah di Indonesia adalah bahwa hingga akhir Desember 2007 belum ada ketentuan akuntansi atau standar akuntansi baik dari pemerintah ataupun IAI yang mengatur pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Lako, 2008).

Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan masih dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pengungkapan sosial perusahaan dengan berpedoman pada PSAK No.1 paragraf 9 yang mengakomodasi pengungkapan sosial secara implisit (Angraini, 2003). PSAK No.1 paragraf 9 menyatakan:

“... berkaitan dengan informasi tambahan, perusahaan dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement),

¹ www.legalitas.org

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Dari pedoman tersebut, perusahaan-perusahaan mulai melaporkan dan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara implisit dalam berbagai jenis laporan, seperti laporan tahunan dan laporan manajemen. Bahkan, beberapa perusahaan memisahkan pelaporan aktivitas sosial dan lingkungannya dalam laporan terpisah. Laporan ini dikenal dengan istilah Laporan Keberlanjutan (sustainability report). Laporan keberlanjutan yang memuat informasi tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan wadah bagi perusahaan untuk mendemonstrasikan bagaimana faktor-faktor non-finansial mempengaruhi aspek keuangan dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat membantu untuk meningkatkan nilai perusahaan (Slater & Gilbert, 2004; Deegan et al, 2006b; Mock, Strohm, & Swartz, 2007). Sehingga laporan keberlanjutan ini dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan atas aktivitas sosial yang dilaksanakan perusahaan. Telkom pertama kali mengungkapkan informasi ekonomi, sosial dan lingkungannya dalam Laporan Keberlanjutan Telkom 2006. Penyusunan laporan tersebut berpedoman pada Sustainability Reporting Guidelines (G3) yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI).² GRI merupakan organisasi yang

² www.telkom.co.id

bertujuan untuk mengembangkan standar yang diterima secara umum untuk pelaporan keberlanjutan (Wallage, 2000).

Meskipun belum banyak, perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai menggunakan laporan keberlanjutan sebagai wadah untuk mengungkapkan isu-isu sosial, lingkungan, serta ekonomi perusahaan. Dan untuk memacu semangat perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengeluarkan laporan keberlanjutannya, Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen mengadakan suatu ajang penghargaan yang dikenal dengan “Indonesia Sustainability Reporting Awards” (ISRA).³ Ajang penghargaan yang telah diadakan semenjak tahun 2005 ini dapat memicu perusahaan dalam meningkatkan daya saingnya secara internasional.⁴

Dengan semakin berkembangnya isu tanggung jawab sosial perusahaan beserta pengungkapannya, muncul pula pertanyaan, apakah aktivitas sosial perusahaan berhubungan dengan kinerja perusahaan? Dan apakah resiko beserta ukuran perusahaan berhubungan dengan pengungkapan masalah sosial perusahaan?

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian-penelitian

³ www.iaiglobal.or.id

⁴ Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam The 2nd Sustainable Enterprise Performance Conference yang diadakan 6-7 September 2007, dikutip dari www.iaiglobal.or.id

tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.⁵ Kelompok penelitian pertama yang menemukan hubungan positif antara CSR dan kinerja perusahaan, antara lain: Pava & Krausz (1996) dan Preston & O'Bannon (1997) menemukan hubungan yang positif antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan, sementara hubungan yang positif antara kinerja perusahaan dan hubungan stakeholder yang baik ditemukan oleh Stanwick and Stanwick (1998) dan oleh Verschoor (1998). Ruf et al. (2001) menemukan bahwa perubahan pada CSR memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan penjualan dan bahwa *return on sales* juga memiliki hubungan yang positif dengan CSR untuk 3 periode keuangan. Simpson & Koher (2002) menemukan hubungan yang positif antara kinerja sosial dan keuangan dengan sampel perusahaan perbankan.

Sementara itu, kelompok kedua menemukan arah yang tidak signifikan dalam hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan baik berbasis akuntansi maupun berbasis pasar saham. Penelitian ini dilakukan oleh Mc William & Siegel (2001), Freedman and Jaggi (1986) and Aupperle, Carroll and Hatfield (1985).

Dan kelompok ketiga mengungkapkan hubungan negatif antara CSR dan kinerja perusahaan yang mana konsisten dengan hipotesis oportunisme manajerial. Preston and O'Bannon (1997) menyarankan kepada manajer untuk mengurangi pengeluaran pada kinerja sosial untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek dan kompensasi personal mereka, tetapi ketika kinerja keuangan buruk, mereka mengalihkan perhatian pada pengeluaran program sosial. Penelitian lain yang

⁵ Becchetti, Ciciretti, & Hasan. 2007. Corporate Social Responsibility and Shareholder's Value: An Event Study Analysis

mendukung hubungan negatif ini antara lain oleh Freedman and Jaggi (1982), Ingram and Frazier (1983), Waddock and Graves (1997).

Selain itu beberapa penelitian juga mencoba untuk memahami faktor-faktor potensial yang mungkin berhubungan dengan tingkat pelaporan keberlanjutan, dan apakah pelaporan keberlanjutan berasosiasi dengan pengukuran kinerja berbasis pasar (market-based measures of performance).⁶ Eksperimen yang dilakukan oleh Milne & Patten (2002) menemukan bahwa pelaporan lingkungan tertentu mempengaruhi persepsi investor dengan melegitimasi aktivitas operasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Blacconiere & Patten (1994) melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan di industri kimia dengan pengungkapan lingkungan yang ekstensif sebelum bencana Bhopal pada tahun 1994 memperlihatkan reaksi pasar yang negatif yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kurang mengungkapkan isu lingkungannya. Namun penelitian Murray et al (2006) tentang pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan 100 perusahaan teratas di Inggris tidak dapat mendukung hubungan antara imbal hasil pasar (market returns) dan pelaporan sosial dan lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan, antara lain Patten (1992) yang menganalisis hubungan antara 3 determinan, yaitu ukuran perusahaan, industri dan profitabilitas, dengan tingkat pengungkapan CSR (Purushotaman, Tower, Hancock, & Taplin: 2002). Dimana ia menemukan hubungan yang signifikan dengan ukuran perusahaan

⁶ Jones, Frost, Loftus, & Van Der Laan. 2007. An Empirical Examination of the Market Returns and Financial Performance of Entities Engaged in Sustainability Reporting

dan industri, namun tidak untuk profitabilitas. Penelitian Hackston dan Milne (1996) juga konsisten dengan penelitian Patten untuk ukuran perusahaan, industri, dan profitabilitas. Sebagai tambahan, penelitiannya juga menyimpulkan bahwa negara pelaporan tidak mempunyai efek terhadap tingkat pengungkapan (Purushotaman, Tower, Hancock, & Taplin: 2002).

Chow & Wong-Boren (1987) and Hossain, Perera & Rahman (1995) menganalisis karakteristik spesifik perusahaan dan tingkat pengungkapan sukarela (Purushotaman, Tower, Hancock, & Taplin: 2002). Mereka menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan, leverage, dan *assets in place*. Sebagai tambahan, studi Hossain, Perera & Rahman (1995) juga menginvestigasi hubungan antara tipe auditor, *listing status* dan tingkat pengungkapan sukarela. Dan kedua penelitian menemukan hubungan yang positif antara tingkat pengungkapan sukarela dengan ukuran perusahaan. Meskipun penelitian Chow & Wong-Boren (1987) mendeteksi hubungan *leverage* yang tidak signifikan, tetapi Hossain, Perera & Rahman (1995) menemukan hubungan yang positif.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara kinerja perusahaan dengan pengukuran berbasis akuntansi dan pasar saham, resiko, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan, karena penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang melihat hubungan ketika faktor spesifik perusahaan tersebut secara bersama-sama dihubungkan dengan tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan. Selain itu juga akan dilihat hubungan antara tingkat pengungkapan sosial dan karakteristik industri beserta status perusahaan. Tingkat pengungkapan sosial yang dimaksud memiliki dua asumsi. Asumsi pertama adalah pengungkapan sosial sebagai proksi kinerja sosial perusahaan,

sehingga diharapkan pada akhirnya tingkat pengungkapan dapat menggambarkan kinerja sosial perusahaan. Dan asumsi kedua adalah pengungkapan sosial bukan merupakan proksi kinerja sosial perusahaan, artinya tingkat pengungkapan sosial bukan merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan, hanya menggambarkan pengungkapan aspek sosial perusahaan untuk tujuan pelaporan. Dan untuk tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan, peneliti akan menggunakan nilai *content analysis* atas pengungkapan aktivitas sosial perusahaan yang terkandung dalam laporan tahunan 2006 dari perusahaan publik yang terdaftar di BEI.

1.2. Permasalahan

Dalam penelitian ini, akan dicari jawaban atas beberapa permasalahan yang terlihat dalam pertanyaan berikut:

Apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor spesifik perusahaan yaitu kinerja perusahaan berbasis akuntansi, kinerja perusahaan berbasis pasar saham, resiko, ukuran perusahaan, karakteristik industri, beserta status perusahaan dengan tingkat pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan?

Pertanyaan tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penelitian atas beberapa perusahaan publik yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan tahunan 2006.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti akan hubungan antara kinerja perusahaan berbasis pasar saham, resiko, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kinerja perusahaan berbasis akuntansi terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh kinerja perusahaan berbasis pasar saham terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh resiko perusahaan terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh karakteristik industri terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan.
6. Menganalisis pengaruh status perusahaan terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terbatas pada pembuktian hubungan antara faktor-faktor kinerja perusahaan berbasis akuntansi dan pasar saham, resiko, ukuran perusahaan, karakteristik industri, dan status perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kinerja perusahaan berbasis

akuntansi akan didefinisikan dengan ROA. Sementara untuk kinerja perusahaan berbasis pasar saham diwakili oleh harga saham pada saat 3 bulan sebelum akhir periode laporan tahunan 2006 dari perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Dan yang dimaksud dengan resiko terbatas pada *operating leverage*. Sedangkan yang dimaksud dengan ukuran perusahaan adalah total aset perusahaan. Karakteristik industri akan memisahkan perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sampel menjadi dua bagian, *high profile industry* dan *low profile industry*. Dan status perusahaan pun mengelompokkan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan berstatus PMA dan non PMA.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari topik penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoritis

Bab ini menjelaskan landasan teori mengenai *Corporate Social Responsibility* dan mencakup sejarah dan perkembangan, definisi, dan konsep pembangunan berkelanjutan. Serta berbagai penelitian terdahulu tentang hubungan CSR dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan baik berbasis

akuntansi maupun berbasis pasar saham, dan juga hubungan antara CSR dengan kinerja non-keuangan.

BAB III Pengembangan Hipotesis dan Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai hipotesis yang digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ini beserta model penelitian yang digunakan, pengambilan sampel, pengoperasian variabel dan pengumpulan data.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil pengolahan data dan analisis dari keluaran yang dihasilkan.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dari penulisan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.